



Analisis Rasio Efektivitas Dan Rasio Efisiensi Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pematang Siantar

Dika Firza Hadinata

dikafirzahadinata2003@gmail.com

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Fitri Mentari Sitompul

mentarifitri24@gmail.com

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Friska Enjelina Nainggolan

nainggolanfriska354@gmail.com

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Nelly Nurvita Tambunan

nelly.tambun4n@gmail.com

Fakultas Sosial sains, Jurusan Akuntansi,
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Abstract *By doing this research aims to examine the financial performance of the Pematang Siantar City Government. This analysis uses Effectiveness ratio and efficiency ratio to assess financial performance. This study is included in the category of quantitative descriptive research. The data used comes from the Financial Report of the Pematang Siantar City Government for the 2020-2023 budget period. Financial ratio analysis is the method used to perform this analysis. The results of the research show that the financial performance of the Pematangsiantar City Government the effectiveness ratio level of PAD receipts in Pematang Siantar City is very effective and for the level of efficiency ratio is still above 90% indicating that financial performance is less efficient Regional.*

Keywords: *Effectiveness ratio, efficiency ratio.*

Abstrak Dengan dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk memeriksa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Pematang Siantar. Analisis ini menggunakan rasio efektivitas dan rasio efisiensi untuk menilai kinerja keuangan. Studi ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan berasal dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pematang Siantar pada periode anggaran 2020-2023. Analisis rasio keuangan adalah metode yang digunakan untuk melakukan analisis ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Pematang Siantar untuk tingkat rasio efektivitas penerimaan PAD Kota Pematang Siantar sangat efektif dan untuk tingkat rasio efisiensi masih diatas 90% menandakan kinerja keuangan Daerah kurang efisien

Kata Kunci : Rasio efektivitas, rasio efisiensi.

PENDAHULUAN

Pengukuran kinerja keuangan daerah bertujuan untuk menilai akuntabilitas maupun efektifitas pengelolaan anggaran sehubungan aktifitas pelayanan publik. Pengukuran kinerja pemerintah daerah memiliki tujuan untuk perwujudan tanggung jawab publik, mengalokasikan sumber daya, memperbaiki kinerja, serta bentuk komunikasi kelembagaan. Selain itu, kinerja

keuangan pemerintah juga dapat dievaluasi melalui rasio keuangan daerah seperti tingkat ketergantungan, tingkat kemandirian, tingkat efektivitas, tingkat efisiensi, dan derajat desentralisasi. Sementara, kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari sistem laporan pertanggungjawaban daerah berupa perhitungan APBD.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan instrumen dan tata tertib yang mengatur mengenai mekanisme dan standar pengelolaan keuangan serta pelaporan keuangan pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah tersebut menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan serta transaksi selama satu periode tahun anggaran. Penyajian laporan keuangan bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan pemerintah daerah, melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, serta memastikan ketaatan penyajian serta kesesuaian penyajian laporan menurut kaidah peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini dilakukan dengan didukung oleh beberapa fenomena yang terjadi di lapangan. Yang pertama adalah penilaian kinerja pengelolaan pendapatan asli daerah Kota Pematang Siantar menurut hasil penelitian (Miswati Gultom, Anggiat Sinurat, Darwin Damanik, 2020) untuk tahun 2015 – 2019 dilihat dari aspek tingkat keuangan adalah untuk hal efektivitas sudah melampaui 100% dan dapat dikatakan sangat efektif pada tahun anggaran 2017 sampai 2019, hal ini disebabkan karena Realisasi lebih besar daripada target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pematang Siantar. Dan berdasarkan tingkat efisiensi pendapatan asli daerah Kota Pematangsiantar pada anggaran tahun 2015 sebesar 99,1% mencerminkan kurang efisien karena diantara 90-100% Tingkat efisiensi pendapatan asli daerah anggaran tahun 2016 sebesar 86% mencerminkan cukup efisien karena diantara 80-90% dari pengelolaan PAD. Tingkat efisiensi pendapatan asli daerah anggaran tahun 2017 sebesar 107% mencerminkan tidak efisien karena diatas 100% dari pengelolaan PAD. Tahun 2018 sebesar 89% mencerminkan cukup efisien karena diantara 80-90% dari pengelolaan PAD Tahun 2019 sebesar 92% mencerminkan kurang efisien. Berdasarkan hal tersebut masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah kinerja keuangan Kota Pematang Siantar ditinjau dari rasio efektivitas, dan efisiensi”?

KAJIAN PUSTAKA

Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, yang dimaksud dengan laporan keuangan Adalah laporan terstruktur mengenai status keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh entitas Pelaporan. Semua laporan ini dibuat setiap periode anggaran berjalan. Laporan keuangan memiliki Karakteristik kualitatif, antara lain relevan, andal, sebanding, dan dapat dipahami. Menurut Peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010, laporan keuangan ini meliputi laporan realisasi anggaran, Laporan perubahan saldo kelebihan anggaran, neraca, laporan operasi, laporan arus kas, laporan Perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan. Laporan Realisasi Anggaran dibuat dengan tujuan Menggambarkan bagaimana kondisi keuangan pemerintah jika dibandingkan antara anggaran dan Realisasi. Manfaat yang didapat dengan dibuatnya Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai Predictive value, yang artinya informasi yang dijadikan gambaran untuk penyusunan perencanaan Pembangunan dan alat proyeksi

kebijakan keuangan dan sebagai feedback value, yang berarti Informasi dijadikan sebagai bahan evaluasi manajemen.

Menurut Pramono (2014), penilaian kinerja keuangan adalah metode yang digunakan untuk menentukan nilai suatu objek melalui alat ukur yang paten dengan menggunakan unit angka yang sesuai. Analisis rasio keuangan daerah yaitu sebuah metode dalam mengukur kinerja keuangan daerah. Hal ini dilakukan guna mengetahui seberapa besar tanggung jawab pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan daerahnya. Tidak hanya dapat menunjukkan bagaimana dana publik digunakan, akan tetapi juga dapat menunjukkan bahwa dana tersebut digunakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Analisis Rasio Keuangan

Menurut Abdul Halim (2004), analisis rasio keuangan merupakan upaya untuk mengetahui karakteristik keuangan daerah sesuai dengan laporan pengelolaan keuangan yang ada. Analisis keuangan yang sesuai dengan APBD dilakukan dengan menghitung dan membandingkan hasil dari beberapa tahun.

Analisis rasio keuangan terhadap APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang sudah ditentukan dan dilaksanakan merupakan metode untuk melihat kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan. Rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan yaitu analisis rasio keuangan yang dipakai dalam melakukan peneliti ini.

1. Rasio Efektivitas

Menurut Halim (2013), rasio efektifitas merupakan representasi dari Tingkat kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi rencana pengeluaran pendapatan Yang telah ditetapkan. Rasio ini berisi perbandingan antara realisasi PAD dan anggarannya. Kemampuan daerah bisa dikatakan efektif, apabila rasio efektifitas bernilai sebesar minimal 100%. Berikut adalah tabel kriteria rasio efektivitas keuangan daerah;

Tabel 2.1 Kriteria Rasio Efektifitas

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 dalam Susanto (2014)

2. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi memuat informasi terkait jumlah dana yang dikeluarkan untuk pengeluaran Dibandingkan dengan jumlah pendapatan yang diterima. Jika rasio yang dihasilkan kurang dari 100%, maka dapat dikatakan kinerja pemerintah daerah tersebut efisien. Semakin rendah rasio Efisiensi, semakin baik kinerja pemerintah daerah.

Tabel berikut menunjukkan standar rasio efisiensi keuangan daerah:

Tabel 2.2 Kriteria Rasio Efisiensi

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
> 100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
< 60%	Sangat Efisien

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 dalam Susanto (2014)

METODE PENELITIAN

Jenis metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Dengan objek dalam penelitiannya adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Pematang Siantar Tahun 2020 – 2023. Penelitian dilakukan guna mengetahui bagaimana tingkat kinerja keuangan Pemerintah Kota Pematang Siantar dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran tahun 2020 - 2023 dengan Menghitung rasio keuangan, yaitu rasio efektifitas dan rasio efisiensi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder berupa Laporan realisasi keuangan APBD pemerintah Kota Pematang Siantar. Data ini diperoleh dari situs web resmi Kementerian Keuangan..Metode analisis data yang digunakan penulis yakni analisis Deskriptif dan perhitungan rasio keuangan. Perhitungan masing – masing rasio keuangan tersebut Ditulis dengan rumus sebagai berikut :

a. Rasio Efektivitas

Rasio ini diukur dengan membandingkan kinerja dan anggaran PAD. Kemudian, tingkat Rasio pendapatan dikelompokkan menurut standar yang ditetapkan oleh Departemen Dalam Negeri, Kepmendagri No. 690.900.327 pada tahun 1996. Rumus untuk menghitung efektifitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

a. Rasio Efisiensi

Dalam menghitung rasio efisiensi kinerja pemerintah daerah digunakan perbandingan Antara total biaya perolehan beban dan pendapatan. Hasil perhitungan ini kemudian diklasifikasikan menurut standar yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tahun 1996 No. 690.900.327. Rumus untuk indeks efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Obyek Penelitian Kota Pematang Siantar

Pematang Siantar adalah salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia terletak pada garis 2° 53' 20"-3° 01' 00" Lintang Utara dan 99° 1'00"-99° 6' 35" Bujur Timur, dan merupakan enklave dari Kabupaten Simalungun Karena letak Pematang Siantar yang strategis, kota ini dilalui oleh Jalan Raya Lintas Sumatra. Kota ini memiliki luas wilayah 79,97 km² dan berpenduduk sebanyak 274.056 jiwa

Kota Pematang Siantar berupa daratan seluas 79,971 km² yang berada pada ketinggian antara 400-500 meter di atas permukaan laut. Pematang SSiantar mempunyai 8 kecamatan dan 53 kelurahan. Berdasarkan luas wilayah menurut kecamatan, kecamatan yang terluas adalah

kecamatan Siantar Sitalasari dengan luas wilayah 22,723 km² atau sama dengan 28,41% dari total luas wilayah Kota Pematang Siantar.

Analisis Rasio Keuangan

1. Rasio Efektifitas

Kinerja pemerintah Kota Pematang Siantar bisa dikatakan efektif bila tingkat rasio yang efektifitas yang diperoleh oleh pemerintah mencapai lebih dari 100%. Tingginya nilai rasio efektifitas menunjukkan baiknya kinerja Pemerintah Kota Pematang Siantar dalam menggunakan pendapatannya. Berdasarkan perhitungan rasio efektifitas yang dijelaskan di atas didapatkan hasil efektifitas kinerja Pemerintah Kota Pematang Siantar dari tahun 2020 – 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Penghitungan Rasio Efektifitas Keuangan Daerah Kota Pematang Siantar Tahun
Anggaran 2020-2023

Tahun	Realisasi PAD (dalam miliar rupiah)	Anggaran PAD (dalam miliar rupiah)	Rasio (%)	Kriteria
2020	140,05	118,95	117.74	Sangat Efektif
2021	137,85	115,86	118.98	Sangat Efektif
2022	154,21	136,07	113.33	Sangat Efektif
2023	150,70	163,35	92.26	Efektif

Sumber : Data Olahan (2024)

Rasio efektifitas pada tahun 2020 sebesar 117.74%, 2021 sebesar 118.98%, 2022 sebesar 113.33%, dan 2023 sebesar 92.26%, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 4.1.

Perhitungan rasio ini pemerintah Kota Pematang Siantar untuk periode anggaran 2020-2023 menunjukkan kategori sangat efektif, dengan menghasilkan pencapaian rata-rata 110.57%. Pencapaian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Pematang Siantar sangat efektif dalam mengumpulkan PAD, seperti yang ditunjukkan oleh tren rasio di atas 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah sudah mengalokasikan dana dengan memperoleh hasil yang optimal.

2. Rasio Efisiensi

Kinerja Pemerintah Kota Pematang Siantar dapat dikatakan efisien apabila hasil nilai rasio efisiensi yang diperoleh pemerintah kurang dari 80% . Semakin rendah rasio efisiensi, semakin baik kemampuan pengeluaran publik untuk menghasilkan pendapatan. Hasil rasio efisiensi yang didapat dari perhitungan di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Penghitungan Rasio Efisiensi PAD Kota Pematang Siantar Tahun Anggaran 2020-
2023

Tahun	Realisasi Belanja (dalam miliar rupiah)	Anggaran Pendapatan (dalam miliar rupiah)	Rasio (%)	Kriteria
2020	829,90	118,95	69.77	Efisien
2021	137,85	115,86	118.98	Tidak Efisien
2022	154,21	136,07	113.33	Tidak Efisien
2023	150,70	163,35	92.25	Kurang Efisien

Sumber : Data Olahan (2024)

Tabel 4.2 menampilkan perkembangan rasio efektifitas pemerintah Kota Pematang Siantar yang kurang memadai, dengan rata-rata hasil sebesar 98.08% selama periode tahun anggaran 2020-

2023 yang dinilai kurang efisien dalam mengeluarkan biayanya.

Hasil perhitungan rasio efisiensi menunjukan kinerja dari pendapatan daerah Kota Pematang Siantar masih rendah dikarenakan nilai realisasi belanja masih lebih besar dan mendekati realisasi pendapatannya. Rendahnya hasil perhitungan rasio tersebut dilihat dari masih tingginya nilai belanja operasi setiap tahunnya. Walaupun tingkat rasio ditahun 2021 sangat tinggi, Pemerintah Kota Pematang Siantar diharapkan melakukan upaya dengan menekan biaya belanja di tahun – tahun selanjutnya sehingga bisa menurunkan persentasi dari perhitungan rasio efisiensi.

PENUTUP DAN SARAN

1. Kesimpulan

Sebagai hasil dari analisis data sebelumnya, dapat disimpulkan yaitu :

1. Rasio efektifitas keuangan Pemerintah Kota Pematang Siantar selama periode 2020- 2023 tergolong dalam kategori sangat efektif dengan persentase di atas seratus, yaitu sebesar 110.57%. Persentase tingkat pencapaian tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Pematang Siantar sudah mengalokasikan dana dengan memperoleh hasil yang optimal.
2. Rasio efesiensi keuangan Pemerintah Kota Pematang Siantar selama periode 2020 hingga 2023 belum menunjukkan hasil yang efesien. dikarenakan nilai rasio masih diatas 90%. Dengan rata – rata yang didapat sebesar 98,08%, kinerja keuangan Pemerintah Kota Pematang Siantar masih dikategorikan kurang efisien.

2. Saran

Sebagai hasil dari analisis data di atas, ada beberapa rekomendasi yang telah diberikan kepada Pemerintah Daerah Kota Pematang Siantar untuk membantu meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

1. Harus mempertahankan tingkat efektivitas dalam merealisasikan sumber pendapatan daerah, dan berusaha meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah untuk mengurangi biaya.
2. Harus memastikan bahwa penerimaan daerah lebih besar dari target yang ditetapkan. Meskipun bantuan dana dari Pemerintah Pusat tetap penting, untuk mencapai hal ini, optimalisasi perolehan PAD harus dilakukan dengan mengeksplorasi sumber penerimaan baru di daerah dan juga memberi kebijakan – kebijakan yang sekiranya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal pembayaran pajak atau retribusi daerah, pemberian dukungan kepada perusahaan daerah agar pelayanan yang diberikan meningkat sehingga perusahaan daerah dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan pendapatan daerah.
3. Pemeritah Kota Pematang Siantar diharapkan dapat memperbesar alokasi untuk belanja modal dengan melakukan pembangunan terkait sarana dan prasarana umum yang memadai dan juga melakukan perawatan rutin agar sarana dan prasarana tersebut dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama.

Saran bagi peneliti selanjutnya:

Diharapkan dapat lebih merinci dalam menganalisa dan meneliti kinerja keuangan pemerintah daerah agar menghasil penelitian yang lebih detail dan bisa menambahkan lagi alat pengukuran atau rasio lain yang memungkinkan untuk menghitung kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga ruang lingkup penelitian dapat lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, Fikri Reza. 2017. Analisis Tingkat Kemandirian, Efektifitas, Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintah Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat. Tugas Akhir, Politeknik Negeri Bandung
- Puspita, Adi, Risma Wira. 2023. Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019-2022
- Rizka Amanda, Khozin, Jouzar. 2021. Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Bandung
- Miswati Gultom, Anggiat, Darwin. 2020. Analisis Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Pematangsiantar
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Dona, Eka Meiliya, Verza Ayu Lestari. 2020. Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku